

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

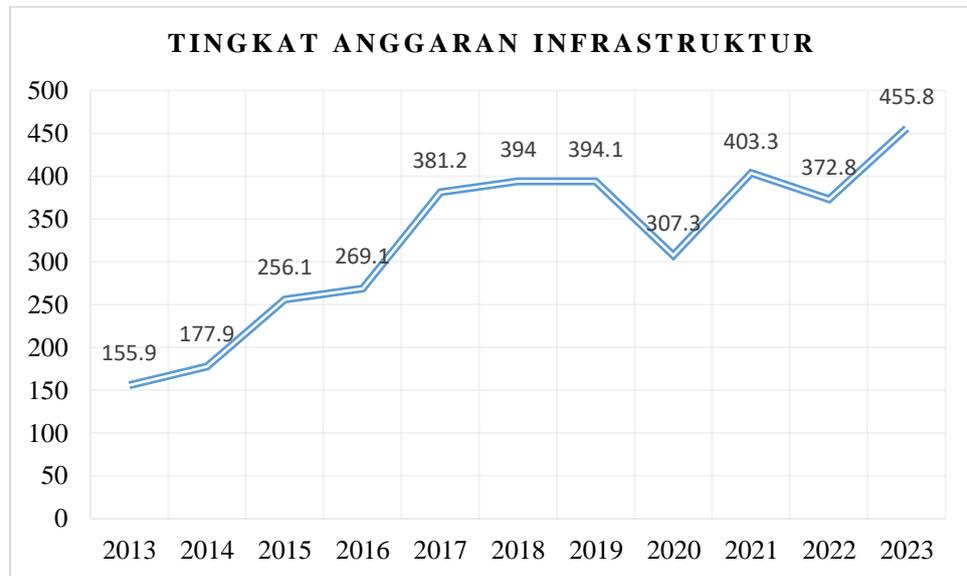
### **A. Latar Belakang**

Setiap perusahaan dituntut siap bersaing dalam menghadapi persaingan dunia bisnis yang terus terjadi dan ketat setiap tahunnya, sehingga mampu bertahan dibanding perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satu komponen penting dari kegiatan operasional perusahaan dalam bersaing adalah sistem pendanaan perusahaan. Kebijakan pendanaan suatu perusahaan merupakan kegiatan perusahaan dalam memutuskan sumber dari pengeluaran dana yang akan dikeluarkan ketika dibutuhkan perusahaan serta untuk memaksimalkan laba dari perusahaan. Pendanaan perusahaan bersumber dari dana internal dan dan eksternal. Pendanaan internal dapat berasal dari laba neto, laba ditahan, modal saham, serta modal sendiri pada perusahaan (Abubakar *et al.*, 2020).

Dana eksternal dapat berasal dari hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang ialah cara perusahaan dalam memperoleh fasilitas pendanaan dari pihak eksternal. Perusahaan yang memakai hutang berjumlah besar menaikkan beban dan pokok pinjaman yang wajib dibayar. Hutang dapat menghasilkan 2 macam manfaat pada perusahaan, seperti mengurangi pajak serta pengembalian atas hutang bernilai tetap, sehingga tidak mengurangi keuntungan bagi pemegang saham (Brigham & Houston, 2018). Jumlah pendanaan hutang yang dapat ditelusuri atas dasar kebutuhan yang diperoleh dari rasio hutang yang hendak dikeluarkan perusahaan disebut sebagai kebijakan hutang.

Apabila sebuah perusahaan mengalami peningkatan produksi, dengan bantuan hutang, perusahaan yang berekspansi dapat melakukan aktivitas operasional lebih aman, dibandingkan perusahaan harus menerbitkan saham baru. Menurut Babu & Jain (1998;Nurmalasari *et al.*, (2023)) penyebab perusahaan lebih mempergunakan hutang, yaitu kendali pihak manajemen lebih besar pada hutang baru dibandingkan dengan saham baru, pembiayaan hutang cenderung tidak sulit diperoleh dibandingkan dengan pembayaran aset, lebih murah biaya transaksi untuk penerbitan kewajiban hutang dibandingkan dengan biaya transaksi untuk penerbitan saham baru, dan terdapat banyak manfaat pajak atas pembayaran bunga.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara signifikan. Dalam periode 2014-2019, rasio utang meningkat dengan laju moderat. Namun, sejak 2020, rasio utang melonjak tajam, akibat pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (Pitaloka, 2024). Hutang negara bertambah lagi menjadi Rp 7.822 triliun pada 2022. Hal ini menyebabkan rasio utang terhadap PDB menggelembung dari 27,42 persen pada 2014 menjadi 38,64 persen pada April 2024. Peningkatan utang ini sebagian besar dipicu oleh kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penanganan pandemi dan belanja infrastruktur.



**Grafik 1.1 Tingkat Anggaran Infrastruktur Republik Indonesia**

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan jumlah nilai anggaran infrastruktur pada periode 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami kenaikan hingga 455,8 triliun rupiah, dilansir dalam website [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com). Jumlah anggaran besar tersebut digunakan dalam pembangunan jalan tol, Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, serta pembangunan lainnya, yang meningkatkan rasio pengungkit (*leverage ratio*) atau rasio utang BUMN Karya, akhirnya mulai mengalami dampak yang signifikan saat pandemi Covid-19 menghantam pada 2020 lalu. Sebagaimana diketahui, proyek-proyek nasional BUMN Karya tersebut, contohnya Waskita, dibiayai oleh utang bank yang besar (dari bank BUMN), terutama utang berbunga jangka pendek.

Anggaran infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan diatas, selama 5 tahun dapat dijelaskan oleh tabel dibawah:

**Tabel 1.1 Jumlah anggaran infrastruktur di Indonesia (dalam triliun rupiah)**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	394,1	307,3	403,3	372,8	455,8

Sumber: Kementerian keuangan

Dilansir dalam [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), kasus mengenai kebijakan hutang dalam setahun terakhir, terjadi masalah pada sejumlah perusahaan sektor infrastruktur, akibat dari pembangunan masif pada sektor infrastruktur di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Terdapat sorotan dari calon presiden Ganjar Pranowo, pada kinerja profitabilitas perusahaan sektor infrastruktur, bahwa beberapa perusahaan mencatatkan pembengkakan laporan keuangan yang cenderung tidak memuaskan, sehingga meningkatkan beban hutang yang tinggi dan penundaan pembayaran hutang. Total hutang perusahaan lebih dari 12 kali lipat sejak Jokowi duduk di puncak pemerintahan.

Di daerah juga terjadi kegagalan pembangunan infrastruktur, yang diakibatkan oleh tidak mampunya pemerintah menanggung biaya pinjaman hutang yang didanai oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar 683 miliar rupiah karena kurangnya perencanaan akan neraca keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Pembangunan infrastruktur awalnya digunakan sebagai cara dalam melakukan pemulihan ekonomi pasca covid-19, seperti jembatan dan perbaikan jalan. Dengan ada hutang cukup besar dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pemerintah Provinsi Maluku setiap

bulannya diharuskan menanggung biaya cicilan hutang sebesar 11 miliar rupiah, yang dilansir dari <https://www.siwalimanews.com>.

Dalam permasalahan yang telah dijabarkan dalam fenomena dalam berita di atas, peneliti mengangkat masalah hutang yang terus meninggi yang di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor infrastruktur. Perusahaan sektor infrastruktur merupakan sektor yang bergerak di penyedia jasa layanan logistik, transportasi, telekomunikasi, utilitas, energi, sarana transportasi, telekomunikasi, hingga infrastruktur, dilansir dalam [www.stockbit.com](http://www.stockbit.com). Menurut Ahmad *et al.*, (2021) perusahaan sektor infrastruktur menjadi salah satu penyumbang hutang terbesar di Indonesia. Merujuk pada data Kementerian BUMN, hutang perusahaan infratraktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kenaikan.

Berikut ini merupakan jumlah perusahaan sektor infrastruktur yang mengalami peningkatan hutang dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023:



**Grafik 1.2** Jumlah perusahaan infrastruktur yang mengalami peningkatan hutang pada periode 2019-2023

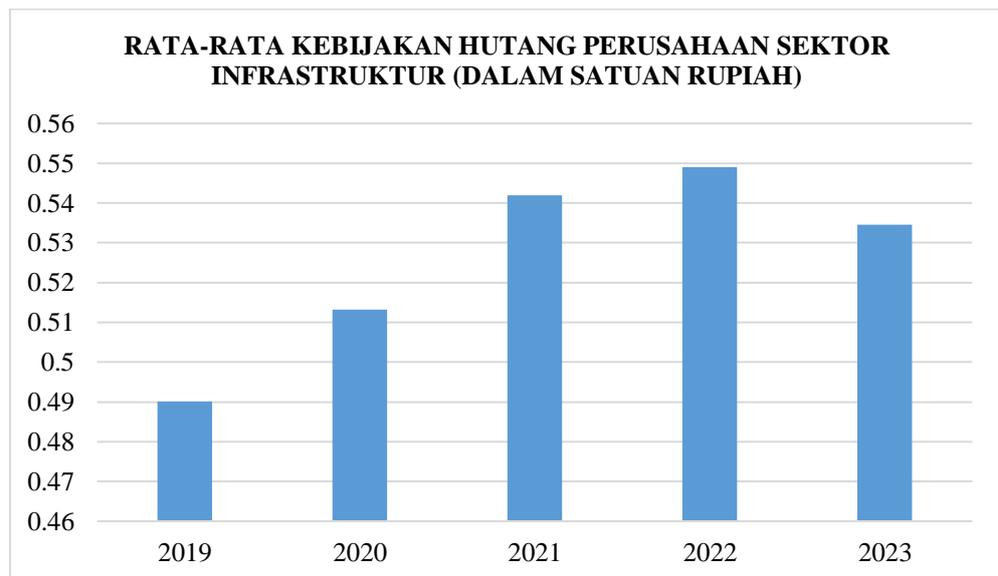
Sumber: Data diolah ([www.idx.com](http://www.idx.com))

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, jumlah perusahaan tersebut yang diperoleh dari perhitungan nilai total hutang dengan total aset yang tercantum dalam website [www.idx.com](http://www.idx.com), yang selama 5 (lima) tahun mengalami fenomena hutang meningkat. Tahun 2019, sebanyak 20 perusahaan. Pada tahun 2020, sebanyak 22 perusahaan. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah perusahaan meningkat sebanyak 25 perusahaan, peningkatan jumlah hutang diakibatkan dari kebutuhan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2023, mengalami penurunan jumlah menjadi 22 perusahaan, rasio hutang mengalami penurunan akibat dari peningkatan modal atau aset yang terjadi secara signifikan, dilansir dari <https://kumparan.com>.

Kebijakan hutang ialah satu diantara keputusan yang disetujui oleh manajer perusahaan dalam rangka menjalankan keperluan pendanaan perusahaan dari pihak ketiga ketika menanggung operasional perusahaan (Fahmie, 2022). Sedangkan menurut Pamungkas & Utiyati (2022) kebijakan hutang yaitu keseluruhan hutang yang dipakai membelanjai aset oleh perusahaan. Perusahaan dinilai mempunyai resiko jika memiliki jumlah hutang yang besar. Namun hal sebaliknya tentu terjadi ketika perusahaan mempunyai hutang kecil atau tidak memiliki hutang sama sekali sebagai fasilitas dalam memperoleh sumber pendanaan dari eksternal dikarenakan perusahaan dinilai tidak bisa mengembangkan operasional perusahaan tersebut.

Menurut Masril *et al* (2021) mengungkapkan bahwa ketika menggunakan hutang sebuah perusahaan hendak mengimplementasikan pembiayaan

periodik atas bunga bank dan pokok pinjaman. Kebijakan hutang dapat berdampak kepada keteraturan pihak manajemen dalam mengintensifkan penerapan dana (laba) yang telah dihasilkan oleh perusahaan, hal tersebut diperlukan dikarenakan hutang yang cukup besar dinilai berimbas pada kesulitan keuangan perusahaan di masa depan. Dana eksternal (hutang) dapat perusahaan gunakan dalam hal yang lebih baik dalam hal mengekspansi usaha, dan memperpanjang perputaran kas perusahaan, dari pengelolaan ini perusahaan dapat mengalokasikan dengan menambah aset pada perusahaan.



**Grafik 1.3 Rata-Rata Kebijakan Hutang Perusahaan Sektor Infrastruktur Periode 2019-2023**

Sumber: Data diolah ([www.idx.com](http://www.idx.com))

Berdasarkan grafik 1.3 di atas menunjukkan bahwa kebijakan hutang yang terjadi pada perusahaan sektor infrastruktur pada periode 2019-2023 yang memiliki nilai tinggi yang terus meningkat tiap tahunnya selama periode 5 tahun, tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,49 atau 49%, meningkat pada tahun 2020 sebanyak 0,51 atau 51%, tahun 2021 sebanyak 0,54 atau 54%, dan

terutama tahun 2022 menjadi catatan rekor baru dalam kebijakan hutang pada perusahaan sektor infrastruktur, yaitu sebesar 0,55 atau 55%. Peningkatan fenomena dari kebijakan hutang berasal dari kebijakan membangun infrastruktur besar-besaran di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dilansir dalam [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com). Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan angka 0,53 atau 53%, adanya peningkatan realisasi penerimaan negara dan optimalisasi belanja negara, membuat anggaran hutang tahun 2023 menurun (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Aktivitas dari total liabilitas atau kewajiban (termasuk hutang) mengalami kenaikan drastis khususnya setelah masa periode ke 2 dari masa pemerintahan Joko Widodo (2019-2024). Sebagaimana diketahui Joko Widodo membangun proyek infrastruktur yang ambisius, salah satunya jalan tol Trans-Jawa sepanjang 1.167 kilometer. Dari penugasan tersebut, akibat pengeloan aset-aset dan neraca keuangan yang tidak sehat meningkatkan rasio utang, penundaan pembayaran utang, dan problem restrukturisasi hutang perusahaan sektor infrastruktur. Kemudian berujung pada kesulitan mendapatkan pengembalian aset yang telah digunakan sebagai pengambilan pendanaan eksternal, berupa hutang di masa depan (Rahman, 2024).

Penelitian mengenai strategi kebijakan hutang perusahaan dilakukan ketika dana internal tidak mencukupi kegiatan operasional perusahaan. Sumber dana internal sebuah perusahaan, yaitu dari laba bersih yang berarti perusahaan memiliki profitabilitas tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas

tinggi dapat melakukan investasi aset. Struktur aset merupakan hal penting dikarenakan perusahaan mempunyai jaminan kepada kreditur untuk melunasi hutang. Dengan kepercayaan kreditur, hendak membuat kegiatan operasional menjadi meningkat yang hendak membuat pendapatan perusahaan mempengaruhi nilai *growth opportunity* perusahaan dimasa depan, hal ini selanjutnya juga akan mempengaruhi kebijakan hutang tinggi pada perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kebijakan hutang dalam penelitian ini, yaitu struktur aset. Menurut Surento & Fitriati (2020) Struktur aset yaitu penetapan alokasi pendanaan masing-masing komposisi kekayaan atau sumber-sumber dari aset perusahaan yang digunakan dalam memastikan besaran dana masing-masing elemen aset, yaitu aset tetap atau aset lancar. Struktur aset juga dapat memiliki pengertian yaitu penjabaran kekayaan aset yang dimiliki perusahaan, dimana struktur aset dengan akun aset tetap menjadi patokan pertimbangan jaminan kreditur.

Struktur aset atau aktiva merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan yang menggambarkan struktur aset, seperti aset tetap, aset lancar, yang merupakan kepemilikan perusahaan pada suatu waktu tertentu untuk suatu periode tertentu yang dapat diukur melalui persamaan, seperti presentase aset lancar terhadap total aset, presentase aset tetap terhadap total aset, dan rasio aset lain-lain terhadap total aset. Hubungan antara tingkat hutang dan struktur aset dapat dipahami dengan lebih baik jika mengingat peran penting yang dimainkan oleh sumber daya dan kapabilitas

dalam keberhasilan perusahaan ini menunjukkan serangkaian sumber daya dan kemampuan unik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan (Camisón *et al.*, 2022).

Untuk meningkatkan struktur aset perusahaan, pengelola perusahaan dapat mencegah risiko yang timbul akibat peminjaman hutang yang berlebihan dengan menetapkan kebijakan hutang secara tepat. Namun distorsi atau inkonsistensi kebijakan hutang dapat berdampak negatif terhadap aset perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Struktur aset dapat mempertimbangkan aset tetap dengan total aset suatu perusahaan (Köse, 2023). Oleh karenanya, semakin besar aset yang disimpan, semakin besar kemungkinan perusahaan menggunakan hutang jangka panjang untuk membiayai dirinya sendiri.



**Grafik 1.4 Rata-Rata Struktur Aset Perusahaan Sektor Infrastruktur Periode 2019-2023**

Sumber: Data diolah ([www.idx.com](http://www.idx.com))

Grafik 1.4 diatas, dapat dilihat bahwa grafik data dari struktur aset dari perusahaan sektor infrastruktur mengalami trend yang fluktuatif. Disebabkan kelebihan sumber daya yang diperoleh internal perusahaan maupun eksternal berupa modal sendiri dan hutang. Faktor-faktor struktur aset ialah pertumbuhan ekonomi, kondisi politik yang tidak stabil dan kebijakan pemerintahan (Ompusunggu, 2020). Dimana pada tahun 2020 dan 2023, grafik mengalami sedikit penurunan jumlah aset dikarenakan penurunan pinjaman jangka pendek disebabkan oleh penyelesaian sebagian pinjaman kepada para kreditur perseroan, berdasarkan <https://mediaasuransinews.co.id>.

Jika dibandingkan pada tahun 2019 yang memiliki nilai 0,363 atau 36,3%. Lalu pada tahun 2022 terjadi peningkatan ke angka 0,369 atau 36,9%, peningkatan ini bersumber dari peningkatan laba bersih dan *cash flow* berdasarkan <https://finance.detik.com/>. Sedangkan tahun 2023, mengalami penurunan yang cukup drastis, penurunan ini lebih besar jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir dengan nilai 0,35 atau 35%, yang diakibatkan perbaikan nilai piutang serta penurunan daya beli masyarakat.

Berdasarkan penelitian oleh (Tridayanti *et al.*, 2022), (Hermanto & Liem, 2022) dan (Surento & Fitriati, 2020) sebelumnya menjelaskan struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang, pada sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana tatanan aset yang tinggi mengindikasikan perusahaan berhasil menanggung biaya operasional perusahaannya, akan lebih berhasil menerima pinjaman hutang, dari pada perusahaan yang tidak menyimpan jaminan. Hasil penelitian (Fahmie, 2022),

dan (Nurfathirani, 2020) menjelaskan bahwa struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, dikarenakan kepemilikan aktiva besar mengharapkan perusahaan mempermudah hutang yang besar pula, sehingga perusahaan tidak mampu dalam pengembalian hutang di masa mendatang.

Faktor kedua yang memengaruhi kebijakan hutang ialah profitabilitas. Berlandaskan dari penelitian yang dilakukan Marfu'ah & Sulistiyowati (2023) profitabilitas ialah skala pengukuran yang memantau efektivitas pihak manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam melihat kemampuan laba yang akan diperoleh dan perbankannya. Profitabilitas digunakan untuk menganalisa kemampuan perusahaan mendapatkan laba memahami kesehatan perusahaan, dan menilai kinerja manajemen menanggung biaya kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Salsabilla & Rahmawati, 2021). Apabila perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi maka akan semakin kecil penerapan hutang kepada pendanaan perusahaan.

Perusahaan yang menghasilkan profitabilitas tinggi atau menguntungkan cenderung menurunkan biaya hutangnya dengan menggunakan laba bersih, yang akan menurunkan rasio dari hutang perusahaan (Aiyar & Ebeke, 2020). Apabila kepentingan dana perusahaan ternyata belum mencukupi, maka perusahaan dapat memakai hutang untuk melengkapi kekurangan tersebut. Perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi menjadikan semakin kecil penerapan hutang dalam pendanaan perusahaan. Dengan kata lain, pihak manajemen perusahaan tidak mungkin akan memulai proyek dengan melalui sumber pendanaan yang kurang memadai.

Herninta (2019) juga menyatakan bahwa profitabilitas ialah keahlian perusahaan menciptakan laba dari operasional penjualannya. Profitabilitas yaitu rasio yang mengilustrasikan keahlian perusahaan untuk mendatangkan laba berdasarkan keahlian dan sumber daya yang dikantonginya, yang bersumber dari aktivitas operasional penjualan, pemakaian aset, serta pemakaian modal. Rasio profitabilitas atau rentabilitas dapat diterapkan selaku alat untuk menaksir besaran tingkat daya guna kinerja manajemen. Dalam penelitian profitabilitas akan diuji menggunakan *Return on Assets* (ROA), yang dapat menunjukkan besaran laba bersih terhadap total aset yang disimpan perusahaan.



**Grafik 1.5 Rata-Rata Profitabilitas Perusahaan Sektor Infrastruktur Periode 2019-2023**

Sumber: Data diolah ([www.idx.com](http://www.idx.com))

Pada grafik 1.5 di atas, dapat dijelaskan pergerakan dari profitabilitas dari perusahaan infrastruktur di Indonesia. Pada tahun 2019 dan 2021, akibat masa dari covid-19, serta penurunan harga dari barang yang dijual, mengakibatkan

penurunan drastis yang pada ekonomi infrastruktur indonesia dengan nilai sebesar -0,05 dan -0,03. Tahun 2020, mengalami sedikit pertumbuhan dikarenakan dengan kontribusi terbesar berasal dari banyaknya kontrak pekerjaan jalan dan jembatan. Pada tahun 2022 dan 2023, kondisi dari profitabilitas sektor infrastruktur memiliki sedikit pertumbuhan akibat pemulihan ekonomi yang menyebabkan kenaikan jumlah pendapatan perusahaan walaupun masih dalam kategori belum memuaskan, dilansir dari <https://www.cnbcindonesia.com>.

Penelitian sebelumnya terkait dengan profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang didukung penelitian yang ditelaah oleh (Wardana, 2021) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Dividen Terhadap Hutang” menyatakan perusahaan yang menyimpan profitabilitas besar, maka memiliki sumber pendanaan internal maksimal, oleh karena pendanaan tersebut mampu diterapkan untuk pembayaran operasional. Penelitian lainnya yaitu (Putra & Rivandi, 2023), dan (Prabowo *et al.*, 2019) perusahaan yang menerima profitabilitas besar, memakai pendanaan internal dari akumulasi profit tahun sebelumnya, lantas perusahaan tidak bergantung kepada pendanaan yang bersumber dari hutang, yang menyebabkan rendahnya pengambilan hutang perusahaan.

Namun hal ini berbeda pada penelitian yang ditelaah (Unnuriyah & Septriana, 2021) dan (Fikri, 2024) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang, yaitu apabila tingkat profitabilitas perusahaan melambung tinggi ataupun mengalami penurunan,

maka perubahan Profitabilitas (ROA) tidak akan berdampak pada kebijakan hutang perusahaan sektor infrastruktur, dikarenakan terdapat penyebab lain dari perusahaan untuk mengambil langkah kebijakan hutang, seperti alasan eksternal untuk menambah peralatan baru. Namun, perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang besar dapat memakai pendanaan dari sumber eksternal atau hutang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan

Faktor ketiga yang mempengaruhi penelitian ini adalah perhitungan kebijakan hutang pada perusahaan infrastruktur adalah *Growth opportunity*. Menurut (Abubakar *et al.*, 2020) *Growth opportunity* atau yang kadang disebut sebagai peluang pertumbuhan ialah sebuah kapasitas perusahaan dalam memakai peluang untuk meningkatkan suatu perusahaan di masa depan dengan pengaruh aliran pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari pertumbuhan atau penurunan *volume* usaha. *Growth opportunity* merupakan perhitungan mengenai perkembangan perusahaan dalam pendapatan operasi produksi yang dilaksanakan pada periode sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan perusahaan diharapkan pihak internal dan eksternal, karena memberi tanda perkembangan perusahaan.

Keberhasilan dan hasil sebagian bergantung pada pengambilan keputusan individu, kondisi dan motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha selanjutnya berpengaruh kepada proses dalam menciptakan peluang pertumbuhan yang akan dialami perusahaan (Amadea & Riana, 2020). Semakin tinggi motivasi perusahaan dalam bersaing maka peluang

pertumbuhan pendapatan semakin meningkat, jika semakin rendah motivasi perusahaan, maka peluang pertumbuhan pendapatan dapat semakin rendah.

Pertumbuhan perusahaan diperlukan bagi semua pihak baik internal maupun eksternal perusahaan (Rossa *et al.*, 2023). Rasio pertumbuhan penjualan ialah rasio yang menilai seberapa besar keahlian sebuah perusahaan ketika memperjuangkan hirarkinya pada dunia industri dan dalam peningkatan perekonomian Indonesia secara umum.



**Grafik 1.6 Rata-Rata Growth Opportunity Perusahaan Sektor Infrastruktur Periode 2019-2023**

Sumber: Data diolah ([www.idx.com](http://www.idx.com))

Pada grafik 1.6 diatas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai dari *growth opportunity* rendah selama periode 2019-2023 ini. Tahun 2019, nilai rata-rata sebanyak 0,11, dikarenakan masa pandemi covid-19. Pada 2020, nilai ini mengalami penurunan, dengan nilai hanya -0,13 atau 13%. Di tahun 2021, nilai ini mengalami kenaikan cukup besar menjadi sebesar 0,17 atau 17%.

Nilai rata-rata *growth opportunity* tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan peningkatan 2 kali lebih besar dari tahun sebelumnya dengan nilai 0,46 atau 46%, dikarenakan besarnya permodalan pihak eksternal dalam rampungnya pembangunan Jalan Tol Lintas-Jawa. Pada tahun 2023, mengalami penurunan tajam sehingga nilai rata-rata hanya sebesar 0,8 atau 8%, dikarenakan banyaknya jumlah proyek infrastruktur yang belum terselesaikan, dilansir pada <https://www.cnbcindonesia.com>.

Beberapa ahli yang telah melakukan penelitian variabel *growth opportunity*, pada penelitian (Carlin & Purwaningsih, 2022) dengan judul “Pengaruh Struktur Aset, Profitabilitas, Biaya Agensi dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang” mengutarakan berpengaruhnya variabel ini kepada tingkatan pertumbuhan besar, memperlihatkan perusahaan melangsungkan ekspansi hingga kebutuhan keuangan makin signifikan. Penelitian (Herninta, 2019), dan (Saputri *et al.*, 2020) menyimpulkan berpengaruh dengan melaporkan pemakaian hutang bertambah bersamaan dengan pertumbuhan perusahaan. Tingkat pertumbuhan yang besar, menonjolkan bahwa perusahaan melangsungkan ekspansi alhasil timbul kebutuhan keuangan yang signifikan.

Penelitian (Fauzi *et al.*, 2022) menyatakan sebagian perusahaan yang menguasai tingkatan pertumbuhan besar menargetkan hutang selaku sumber pendanaan eksternal. Perusahaan memutuskan sumber pendanaan tetap yang memiliki beban bunga pinjaman yang sedikit serta lebih memprioritaskan untuk menerapkan pendanaan internal. Penelitian (Abubakar *et al.*, 2020)

juga tidak memiliki pengaruh antara *growth opportunity* dengan kebijakan hutang, menyatakan bahwa apabila pertumbuhan yang dilalui perusahaan tersebut, menimbulkan perusahaan lebih memerlukan dana yang besar, hingga kesempatan perusahaan ketika hendak mempublikasikan saham baru yang memiliki bayaran lebih sedikit daripada hutang.

Berdasarkan dari berbagai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai struktur aset, profitabilitas, dan *growth opportunity*, terhadap kebijakan hutang, yang diperlukan pengkajian dan pembaruan dalam penelitiannya, serta latar belakang serta fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini dan memberinya dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR ASET, PROFITABILITAS, DAN *GROWTH OPPORTUNITY* TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Penyusunan penelitian ini agar lebih fokus dan terarah, maka diperlukan pembatasan masalah yang hendak diteliti. Adapun batasan-batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang mengalami peningkatan hutang dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2023.
3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang menerapkan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangan tahunannya pada 2019-2023.
4. Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan secara lengkap di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2023.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah dari struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor infratraktur periode 2019-2023?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor infratraktur periode 2019-2023?
3. Apakah *growth opportunity* berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor infratraktur periode 2019-2023?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor infratraktur periode 2019-2023

2. Untuk menguji profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor infratraktur periode 2019-2023
3. Untuk menguji *growth opportunity* berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor infratraktur periode 2019-2023.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

- a. Penelitian yang telah dilakukan dapat meningkatkan pemahaman tentang hal yang berkaitan dengan hal struktur aset, profitabilitas, dan *growth opportunity*.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

### **2. Bagi Calon Investor**

- a. Bagi calon investor dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan melakukan pembelian saham pada sebuah perusahaan.
- b. Penelitian dapat menjadi informasi mengenai kebijakan pendanaan hutang yang terjadi di perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **3. Bagi Perusahaan.**

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu informasi ke pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan pendanaan melalui hutang di masa depan.
- b. Penelitian dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran dalam proses pembelajaran di Universitas.

#### **4. Bagi Universitas PGRI Madiun**

- a. Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sumber penelitian bagi mahasiswa Universitas PGRI Madiun di masa depan.
- b. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi salah satu faktor dari meningkatkan reputasi Universitas PGRI Madiun di bidang akademik.